

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

# BPK : Pengamanan Aset Tanah Milik DKI Kurang Memadai

## Sejumlah lahan milik pemerintah DKI tidak jelas batasnya

**JAKARTA** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta menilai pengamanan fisik atas aset tetap tanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang memadai. Catatan itu disampaikan BPK melalui laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah DKI 2018.

Laporan hasil pemeriksaan itu menyebutkan tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang diserahkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terletak di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur, justru digunakan masyarakat sebagai tanah garapan. “Tidak ada batas

lahan yang jelas antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan lahan milik pihak lain,” demikian seperti dikutip dari laporan hasil pemeriksaan itu.

BPK Jakarta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu pada 15 Mei lalu. Meski mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah DKI.

Permasalahan itu antara lain terkait dengan pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap yang belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Temuan lainnya ialah adanya fasos dan fasum berupa tanah yang telah diserahkan kepada pemerintah DKI tapi masih dimanfaatkan pengembang. Selain itu, masih terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan pengembang, tapi belum diserahkan kepada pemerintah DKI.

Laporan hasil pemeriksaan itu juga menyebutkan tanah milik Dinas Bina Marga yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan tembus dari Jalan Sudirman sampai Jalan KH Mas Mansyur (Karet Kebembem) dan proyek Jalan Seno-Masjid Al Makmur belum memiliki batas lahan yang jelas.

Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Eko Mardirianto, mengatakan lahan yang bertempat di Jalan Raya Tipar Cakung tersebut telah dipasang papan petunjuk yang menandakan bahwa tanah

seluas 98.714 meter persegi itu milik pemerintah DKI. Lahan tersebut juga telah tercatat di kartu inventaris barang (KIB).

Menurut Eko, salah satu kekurangan dalam pengamanan aset ialah bolongnya bagian depan pagar pembatas lahan tersebut. Walhasil, auditor menyimpulkan bahwa batas aset tanah belum jelas. “Karena pagar bolong, dari depan kelihatannya batas (tanahnya) jadi enggak jelas,” ujarnya ketika dihubungi *Tempo*, 27 Mei lalu.

Selain itu, kata Eko, saat auditor BPK mengunjungi tanah itu, ditemukan warga yang tengah berkebun di lahan tersebut. Walhasil, auditor menilai Dinas tidak menguasai tanah senilai Rp 69,3 miliar itu.

Eko menjelaskan, pada tahun ini, Dinas berencana menggunakan tanah itu untuk membangun rumah susun. Pemerintah DKI juga berencana membangun puskesmas di sana. “Dengan adanya pembangunan, para penggarap lahan akan pergi sendirinya karena mereka tahu itu aset pemerintah,” katanya.

Pelaksana tugas Kepala BPAD DKI Jakarta, Pujiono, tidak menyanggah temuan

BPK tersebut. Menurut dia, temuan itu menunjukkan masih kurangnya pengawasan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemilik atau pengguna aset. “Pengawasannya (terhadap aset) harus ditingkatkan,” ucapnya.

Pujiono menjelaskan, SKPD seharusnya berupaya menjaga aset yang digunakan, apalagi jika aset tersebut sudah tercatat di KIB SKPD itu. “Pengamanan aset menjadi tanggung jawab mereka,” tuturnya.

Menurut Pujiono, pengamanan aset tanah dalam bentuk pemagaran sangat penting untuk mencegah pihak-pihak tertentu menggugat aset itu. Sebelumnya, sejumlah lahan milik pemerintah DKI banyak yang lepas akibat digugat sejumlah pihak. “Sertifikasi dan pemagaran itu harus dilakukan secara masif,” katanya. ●



Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas Sindo Tempo  
Indopos Pos Kota Warta Kota

# BPK : Pengamanan Aset Tanah Milik DKI Kurang Memadai

Sejumlah lahan milik pemerintah DKI tidak jelas batasnya

## Temuan Auditor

**B**ADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta Raya menemukan sejumlah lahan milik Pemerintah Provinsi DKI berpotensi hilang. Potensi itu muncul karena pengawasan terhadap aset-aset tersebut kurang memadai.

Berikut ini sejumlah temuan auditor terkait dengan pengamanan fisik aset tanah milik pemerintah DKI.

### ■ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Gedung rusunawa di Muara Karang senilai Rp 36,8 miliar dikelola Yayasan Buddha Tzu Chi II tanpa perikatan pemanfaatan.

### ■ Dinas Kehutanan

Tanah dari pengadaan Dinas Kehutanan tahun anggaran 2018, yang berlokasi di Jalan Mandor Hasan (Taman Indraloka) dan Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur, belum memiliki batas lahan yang jelas dengan lahan pihak lain. Selain itu, lahan tersebut belum dilengkapi papan identitas pemilik lahan.

### ■ Dinas Bina Marga

Tanah milik Dinas Bina Marga yang akan digunakan untuk proyek pembangunan jalan tembus dari Jalan Sudirman sampai Jalan KH Mas Mansyur (Karet Kebembem) dan proyek Jalan Seno-Masjid Al Makmur belum memiliki batas lahan yang jelas.

SUMBER: BPK PERWAKILAN DKI JAKARTA